

DKI Genjot Penanaman Mangrove untuk Kendalikan Rob di Pesisir Jakarta

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI menggenjot penanaman mangrove dengan melibatkan unsur masyarakat dan organisasi untuk mengendalikan ancaman rob di kawasan pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu. “Secara bertahap kami akan atasi semua masalah-masalah seperti itu. Perlu waktu dan biaya yang tidak sedikit,” katanya.

Tapi prinsipnya, kata Riza, Pemprov DKI Jakarta selalu mengupayakan yang terbaik bagi warga Jakarta. Berdasarkan data Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta periode 2023-2026, disebutkan perubahan iklim mendorong peningkatan permukaan air laut. Sementara itu, penurunan muka tanah di pesisir DKI Jakarta terjadi sejak 1925-2015 sebesar nol hingga empat meter.

Penurunan muka tanah dan peningkatan permukaan air laut mengancam pulau-pulau di Kepulauan Seribu dan daratan pesisir Jakarta tenggelam. Sedangkan secara geografis, dalam RPD itu disebutkan posisi Jakarta berada di wilayah pesisir landai dengan 40 persen area daratan berada di bawah muka laut.

Penanaman mangrove dinilai menjadi salah satu solusi menahan potensi abrasi karena mengurangi laju gelombang air laut. ● yan

Penanaman mangrove dinilai menjadi salah satu solusi menahan potensi abrasi karena mengurangi laju gelombang air laut. ● yan

Penanaman mangrove dinilai menjadi salah satu solusi menahan potensi abrasi karena mengurangi laju gelombang air laut. ● yan

Penanaman mangrove dinilai menjadi salah satu solusi menahan potensi abrasi karena mengurangi laju gelombang air laut. ● yan

Bupati Bekasi Dukung Penuh Raperda Pondok Pesantren

CIKARANG (IM) - Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan merespons positif dengan mendukung penuh pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait pondok pesantren oleh legislatif setempat mengingat kontribusi pesantren meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia generasi muda.

“Karena pesantren berperan penting dalam mewujudkan Islam yang ‘Rahmatan lil Alamin’, pesantren melahirkan insan-insan beriman yang berakhlak cinta Tanah Air dan sudah terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan serta perjuangan meraih kemerdekaan,” kata Dani.

Dia mengatakan pondok pesantren berperan dalam pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengantar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Jadi secara historis keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat akan jenis layanan pendidikan dan umat,” katanya.

Menurut dia perlu adanya pengaturan guna menjamin penyelenggaraan pesantren dengan tujuan memberikan rekomendasi afirmasi serta

fasilitasi kepada pesantren berdasarkan ciri khasnya. “Pesantren wajib diberi kesempatan untuk berkembang difasilitasi dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa. Termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tentunya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren,” kata Dani.

Anggota Pansus 19 DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdy Haryadi menjelaskan pembahasan Raperda Pondok Pesantren dilakukan mengingat regulasi yang mengatur keberadaan pesantren sudah ada, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan daerah Provinsi Jawa Barat.

Menurut dia alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi sejauh ini belum menyentuh pondok pesantren bahkan keberadaan pesantren seperti dianaktirikan.

“Selama ini pesantren seperti dianaktirikan. Nah Raperda ini juga kita maksudkan agar pemerintah daerah melakukan intervensi anggaran kepada pondok pesantren,” katanya.

Sementara di sisi lain, keberadaan pondok pesantren diakui memiliki kontribusi dalam hal mencerdaskan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan formal, dakwah, serta pembelajaran umat.

“Selain itu juga ada soal bagaimana kita bisa menggaransi lulusan pesantren agar memiliki standar yang sama dengan lulusan negeri,” ujar Rusdy. ● yan

Pedagang Berharap Pasar Blok A Segera Direvitalisasi Usai Kebakaran

JAKARTA (IM) - Pedagang Pasar Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan meminta Pemprov DKI Jakarta segera merevitalisasi pasar tersebut. Pasalnya, sejak pasar tersebut dilanda kebakaran beberapa tahun lalu hingga kini belum ada tanda-tanda Pasar Blok A akan dibangun kembali.

Ketua Koppas Pasar Blok A, Ngadiran mengatakan, para pedagang di Pasar Blok A saat ini gelisah karena belum adanya kejelasan pembangunan pasar.

“Selama ini pedagang Pasar Blok A hanya menerima janji-janji semata bahwa akan dibangun, dan ini sudah bertahun-tahun janji tersebut disampaikan,” katanya kepada wartawan pada Jumat (23/9).

Pihaknya juga telah berulang kali mempertanyakan kepada Pemprov DKI terkait pembangunan Pasar Blok A. Namun, hingga kini belum ada jawaban yang pasti.

Ngadiran juga mengatakan, pedagang mengapresiasi adanya rencana dari Presiden Jokowi dan Gubernur Anies Baswedan yang mengizinkan Pasar Blok A dibangun kembali dan disatukan dengan rusun

“Kita mengapresiasi keinginan Presiden dan Gubernur, agar di bagian atas dibangun dengan rusun, dan hal tersebut bagus. Yang terpenting bagi kami ada pembangunan,” tuturnya.

Oleh karena itu dia berharap agar Pemprov DKI segera melakukan pembangunan terhadap Pasar Blok A. Menurutnya, para pedagang sudah tidak sabar untuk mendapatkan kepastian kapan pembangunan dilakukan.

Bahkan, para pedagang ini berencana menanyakan langsung beramai-ramai ke Pemprov DKI terkait kejelasan pembangunan Pasar Blok A.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Inkoppas, Andrian Lame Muhar menambahkan, permasalahan Pasar Blok A sangat miris, sampai hari ini pembangunannya belum terlaksana.

“Kami dari Inkoppas terus mendorong supaya PD Pasar Jaya cepat beraudisi dengan Koppas Blok A, ataupun dengan Inkoppas agar dapat terselesaikan permasalahan pembangunan pasar ini. Saya berharap sekali Pemprov DKI memperhatikan sedikit masalah revitalisasi di Pasar Blok A,” tutupnya. ● yan

4 | Metropolis

FOTO:ANT



LATIHAN DI JAKARTA JELANG PIALA DUNIA AMPUTEE FOOTBALL

Pesepak bola Timnas Garuda Indonesia Amputee Football (INAF) Agung Rizki (tengah) menendang bola ke arah gawang saat latihan di Lapangan Sport Club Serenia Mansion, Cilandak, Jakarta, Jumat (23/9). Timnas Garuda INAF kembali menggelar latihan dalam rangka persiapan mengikuti Piala Dunia Amputee Football yang digelar di Turki pada Oktober mendatang.

Pj Gubernur DKI Jakarta Harus Bebas Kepentingan Politik

Pj Gubernur mendatang harus mampu menjalankan, mempertahankan, bahkan meningkatkan peran dan fungsi Provinsi DKI Jakarta dalam ekonomi politik nasional. Pj Gubernur harus mampu mengelola dinamika di DKI Jakarta, baik dinamika politik dan sosial kemasyarakatan maupun dinamika ekonomi, investasi dan perdagangan.

JAKARTA (IM) - Pada 17 Oktober 2022 mendatang, Provinsi DKI Jakarta akan dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur, yang menggantikan Anies Rasyid Baswedan - Ahmad Riza Patria, yang habis masa

jabatannya. Penjabat Gubernur tersebut akan menjalankan operasional dan administrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sampai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2024 mendatang.

Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Agus Herta Sumarto, Pj Gubernur harus mampu menjalankan, mempertahankan, bahkan meningkatkan peran dan fungsi Provinsi DKI Jakarta dalam ekonomi politik nasional. “Pj Gubernur harus mampu mengelola dinamika di DKI Jakarta, baik dinamika politik dan sosial kemasyarakatan maupun dinamika ekonomi, investasi dan perdagangan,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (23/9).

Sebagaimana diketahui, kata dia, selama ini, Provinsi DKI Jakarta menjadi episentrum perekonomian nasional. Hampir seluruh aktivitas per-

ekonomian nasional dikendalikan dari Jakarta. Hal ini menjadikan DKI Jakarta ibarat organ jantung dalam sistem anatomi tubuh manusia. Ibarat memompa darah ke seluruh jaringan tubuh, Provinsi DKI Jakarta memompa peredaran uang sampai ke pelosok daerah. Kinerja aktivitas perekonomian di Provinsi DKI Jakarta akan sangat memengaruhi kinerja dan aktivitas perekonomian di daerah-daerah di luar DKI Jakarta.

“Kondusifitas di DKI Jakarta harus benar-benar dijaga. Oleh karena itu, figur Pj Gubernur DKI Jakarta mendatang diharapkan mampu menciptakan kondusifitas tersebut dengan mengelola dinamika yang terjadi di DKI Jakarta dengan baik,” terangnya.

Heterogenya masyarakat DKI Jakarta menjadikan pola sikap dan pola perilaku masyarakat di Provinsi DKI Jakarta sangat beragam. “Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi Pj Gubernur DKI Jakarta mendatang relatif lebih besar dibanding Pj kepala daerah di daerah lainnya di luar Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pj Gubernur mendatang haruslah figur yang tepat yang dapat diterima oleh semua kelompok dan lapisan masyarakat. Figur yang dipercaya oleh semua masyarakat mampu mem-

bangun kembali persatuan yang sempat terkokak karena kontestasi politik identitas yang terlalu kuat.

Bahkan, DKI Jakarta harus bisa menjadi bumper yang mampu menggerakkan perekonomian nasional di tengah kondisi yang serba sulit. “Perekonomian yang kuat tidak mungkin tercipta jika stabilitas sosial kemasyarakatan tidak terbangun dengan baik,” katanya.

“Oleh sebab itu, perpecahan antar elemen masyarakat yang pernah mencuat pada kontestasi politik pada 2017 silam tidak boleh terulang kembali karena akan menghambat proses pembangunan di DKI Jakarta dan tentunya di Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat politik, yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengkhawatirkan sosok Pj Gubernur DKI yang memiliki relasi politik dengan kekuasaan bakal mengintervensi dan memengaruhi peta politik Pilgub DKI tahun 2024.

Dia mengatakan, bila Pj Gubernur DKI adalah sosok yang tidak memiliki relasi politik dengan Istana Negara maka kontestasi pesta demokrasi di Jakarta bakal berjalan secara *fair*. Namun, pemilihan gubernur nantinya sulit melahirkan nilai-nilai demokrasi jika pemimpin Jakarta memiliki keberpihakan secara politik. ● yan

Pemprov Tuntaskan Pembangunan Saringan Sampah di Kali Ciliwung

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menuntaskan pembangunan saringan sampah di Kali Ciliwung pada segmen TB Simatupang di perbatasan Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saringan sampah di lokasi tersebut berdaya tampung sekitar 222 meter kubik (m³) per hari.

Fasilitas itu untuk pengendalian banjir akibat meluapnya Kali Ciliwung. “Selama ini terjadi penekanan volume sampah yang terkonsentrasi hanya pada satu titik penanganannya di Pintu Air Manggarai dan Kali Ciliwung Jembatan Kampung Melayu,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Jumat (23/9).

Proyek saringan dan penanganannya di Kali Ciliwung segmen TB Simatupang itu dibangun dengan dua ponton terapung. Ditambah satu bangunan segmen untuk penanganan berlapis, yakni penyaringan dan pencacahan sampah.

Sistem kerja saringan tersebut, yakni ponton terapung yang diterapkan di lokasi saringan berfungsi untuk meng-

arahkan sampah ke segmen sungai sehingga dapat menghindari tumpukan akibat sampah yang tertahan di badan air. Saringan dilakukan secara berlapis.

Sehingga pengambilan sampah dari Kali Ciliwung dapat dilakukan secara berjenjang, dari saringan kasar sampai ke saringan lebih halus. Proses penyaringan sampah dibagi dalam dua tahap penyaringan dan dua tahap pencacahan sampah organik.

Saringan tahap pertama berfungsi untuk sampah-sampah ukuran di atas 50 sentimeter (cm), mengangkat dari badan air, menempatkannya di jalur khusus (conveyor) untuk dihancurkan menjadi ukuran lebih kecil, yakni 5 cm-20 cm. Kemudian, saringan tahap kedua, berfungsi menangkap sampah-sampah ukuran di atas 20 cm, mengangkat dari badan air, menempatkannya di conveyor.

Kemudian, dibawa ke mesin penghancur atau untuk dihancurkan menjadi ukuran sekitar 3-5 cm. Selanjutnya pada tahap pencacahan pertama berfungsi untuk mencacah sampah berukuran besar di antaranya kayu, bambu, kasur, bekas bangunan,

pertanian dan lain-lain menjadi ukuran 10-20 cm.

Fasilitas saringan itu juga berfungsi untuk memisahkan sampah halus dan sampah kasar sebelum sampah dimasukkan ke pencacah tahap dua. Pada tahap pencacah kedua, sampah berukuran besar di antaranya kayu, bambu, kasur, bekas bangunan, pertanian dan lain-lain dicacah menjadi ukuran 3-5 cm.

Dengan fasilitas itu, tumpukan sampah yang biasanya tersendat di Manggarai dan Kampung Melayu ditargetkan dapat diurai. Selama ini, tumpukan sampah berkontribusi menyebabkan luapan air sungai sehingga menimbulkan banjir terutama saat musim hujan akibat sampah kiriman dari hulu Kali Ciliwung. Dengan begitu, diharapkan mengurangi beban penanganan sampah kiriman di Pintu Air Manggarai yang juga memiliki ruang terbatas.

Proyek fasilitas itu memiliki nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket sebesar Rp 197,1 miliar yang dialokasikan dari APBD DKI 2022. Rencananya, Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan meresmikan fasilitas tersebut pada Senin (26/9). ● yan



AKSI GLOBAL CLIMATE STRIKE

Aktivis dari Koalisi Jeda untuk Iklim, XR Indonesia, BEM FMIPA UI dan organisasi kaum muda melakukan aksi kreatif “Global Climate Strike (GCS)” di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (23/9). Aksi yang mengkritisi persoalan krisis iklim dan dampaknya tersebut mengusung tema #PeopleNotProfit.

DIARAHKAN JADI PERMUKIMAN

PDIP DPRD DKI: Reklamasi Pulau G Solusi Kekurangan Lahan di Daratan

JAKARTA (IM) - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono buka suara soal kawasan Pulau Reklamasi Pulau G yang diarahkan untuk permukiman. Untuk diketahui, arahan Pulau G untuk permukiman tercantum dalam Pasal 192 nomor (3) Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta.

Gembong berujar, hal tersebut memang sesuai dengan tujuan awal dibuatnya pulau reklamasi. “Pulau reklamasi itu memang ditujukan untuk itu (permukiman). Menambah daratan untuk membangun perumahan dalam rangka menjawab kekurangan lahan yang ada di daratan,” tuturnya melalui sambungan telepon, Jumat (23/9).

Di sisi lain, menurut Gembong, pulau reklamasi sebaiknya tak hanya digunakan untuk permukiman saja. Namun, bisa juga menampung kompleks perkantoran.

“Bisa juga untuk permukiman dan bisa saja di luar permukiman. Bisa saja campuran seperti perkantoran di situ (pulau reklamasi),” sebut dia.

Anggota Komisi A DPRD DKI itu mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi beban lahan Ibu Kota. “Kenapa dilakukan? Ini untuk mengurangi beban daratan. Beban daratan berat, maka perlu digeser,” ucap Gembong. Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta tanggal 15 September 2022, Nomor 2, yang dibuat dihadapan Ir. SARI WAHJUNI, MSc., SH., MH., MKn., telah ditandatangani akta Pernyataan Keputusannya Para Pemegang Saham Di Luar Rapat mengenai Pembubaran PT. REKA PRIMA BERGERAK, berkedudukan di Kabupaten Bandung. Segala Utang Piutang dan kewajiban perusahaan terhitung mulai tanggal liklikan ini telah menjadi tanggung jawab Tim Likuidasi Perseroan. Dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perseroan dapat menghubungi Tim Likuidasi Perseroan dengan alamat Jalan Tugu Asri B-5, RT. 005, RW. 013, Kel. Pasirlayung, Kec. Cibueyung Kidul, Kota Bandung.

Direktur,
KHAIRUL UMMAH